

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi dalam sistem informasi keuangan ditandai dengan adanya *New Public Management* (NPM) yang merupakan elemen penting dalam meningkatkan manajemen dan pengambilan keputusan di lembaga pemerintah. Penggunaan akuntansi berbasis akrual di sektor publik yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi kas tradisional juga salah satu perubahan sistem informasi keuangan (Steccolini, 2019).

Perdebatan tentang seberapa penting implementasi atau adopsi *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) akrual masih ada di banyak negara. Alasan tersebut karena pentingnya akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, manajemen keuangan negara yang lebih baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan alasan lain yang merupakan pendekatan *isomorfisme* (implementasi IPSAS untuk mendapatkan legitimasi kelembagaan). Seperti yang dijelaskan dalam NPM, Tren yang berubah menjadi akuntansi akrual disebabkan oleh adanya kebutuhan akan transparansi dan efisiensi (Christiaens dkk., 2010).

Penelitian mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di negara lain diantaranya dilakukan oleh Ouda (2018) dan Adhikari & Mellempvik (2011). Dari penelitian tersebut, ada negara yang gagal dan ada pula yang berhasil dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Salah satu negara yang berhasil ialah Selandia Baru. Dalam penelitiannya, Ouda (2018) mengatakan bahwa kunci sukses penerapan basis akrual di Selandia Baru ialah karena adanya beberapa

prakondisi yang telah dipenuhi yakni perubahan budaya manajemen, dukungan politis dan birokrasi dari pemerintah, dukungan dari kaum profesional dan akademisi, strategi komunikasi yang baik, keinginan untuk berubah, konsultasi dan koordinasi antar pemerintah, penanggulangan masalah akuntansi tertentu, konsistensi antara akuntansi dan penganggaran, kemampuan yang baik dalam teknologi informasi, serta dukungan finansial pemerintah internasional.

Sementara itu menurut Adhikari & Mellempik (2011), Nepal justru gagal menerapkan basis akrual disebabkan oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan kurangnya motivasi dari pemerintah. Kurangnya motivasi pemerintah ini dikarenakan adopsi akuntansi akrual bukan terjadi atas keinginan sendiri melainkan paksaan dari organisasi internasional. Adanya kesuksesan dan kegagalan yang dialami oleh negara-negara yang lebih dulu menerapkan basis akrual seharusnya dapat menjadi referensi dan koreksi bagi pemerintah Indonesia agar dapat berhasil dalam mengimplementasikan basis akrual.

Tata kelola yang buruk menjadi salah satu krisis yang terjadi di Indonesia (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah satu upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Oleh karena itu, tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintahan (Kodrat, 2010).

Cohen dkk (2017) menyatakan bahwa demi mewujudkan *good governance* maka dilakukan perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi

akuntansi berbasis akrual perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas saat ini dianggap tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja. Penggunaan basis akrual penuh juga sesuai dengan basis akuntansi yang dianut dalam *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)*.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015. Ini berarti pada tahun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya (Asri, 2015).

Satuan Kerja pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Wiryaningsih dkk., 2017)

Menurut John & Setiawan (2009) pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban keuangan negara dikatakan baik apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan oleh para

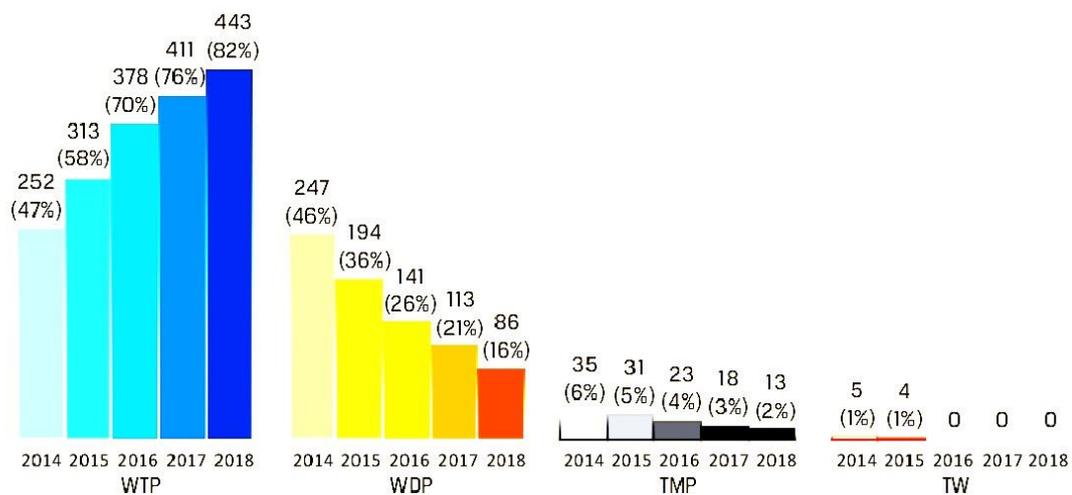
pemakainya dan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangannya dari BPK. Oleh karena Opini WTP merupakan salah satu cerminan akuntabilitas sehingga idealnya dengan berlakunya SAP berbasis akrual akan lebih memudahkan entitas untuk mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat kekhawatiran atas kemungkinan penurunan opini atas laporan keuangan pemerintah pada tahap-tahap awal implementasi akuntansi berbasis akrual karena konsep akuntansi akrual bagi pemerintah daerah merupakan hal yang baru. Untuk itu perlu adanya persiapan strategi, dan upaya yang serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar laporan keuangannya dapat mendapatkan opini WTP dari BPK (Muttaqin dkk., 2015).

Persentase jumlah pemerintah daerah yang menyerahkan LKPD berbasis akrual tahun 2016 kepada BPK masih belum maksimal 100%, dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2016, hanya 537 LKPD tahun 2016 yang telah dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017. Sedangkan 5 LKPD tahun 2016 masih terlambat dilaporkan kepada BPK sehingga baru dapat dilaporkan pada IHPS II tahun 2017 yang seharusnya tidak lagi mencantumkan informasi keuangan tahun sebelumnya melainkan harus telah mencantumkan informasi keuangan tahun berjalan. LKPD yang terlambat disampaikan yaitu LKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, Pemkab Aceh Tenggara, Pemkab Pidie, Pemkab Pidie Jaya, dan Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe di Provinsi Aceh (<https://www.bpk.go.id>, 2019).

Salah satu penyebab terlambatnya LKPD 5 Pemkab ataupun Pemko di Provinsi Aceh tersebut menurut IHPS II tahun 2017 melainkan karena kualitas

SDM, minimnya sarana pendukung, dan masih rendahnya komitmen organisasi pada pemerintah daerah dalam memberikan insentif tambahan kepada pegawai yang menyusun LKPD tahun 2016. (Darma dan Ramadhan, 2018).

Kompleksnya permasalahan implementasi SAP berbasis akrual pada tingkat Pemda juga dapat dilihat pada buku IHPS I tahun 2019. Pada buku tersebut dijelaskan perkembangan opini BPK-RI terhadap LKPD pada tahun 2014 sampai dengan 2018 yang memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2014-2018 yang wajib diserahkan. Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut ini :



Gambar 1.1
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2014-2018
 Sumber: www.bpk.go.id

Dalam 5 tahun terakhir (2014-2018), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 35 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 82% pada LKPD Tahun 2018. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP dan TMP

mengalami penurunan masing-masing sebesar 30 poin persen (dari 46% menjadi 16%) dan 4 poin persen (dari 6% menjadi 2%) sehingga masih diperlukan kerja keras dari seluruh sektor terkait agar opini WTP dari BPK dapat diterima oleh seluruh pemerintah daerah pada IHPS yang akan datang dengan persentase 100% (<https://www.bpk.go.id>, 2019).

Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan penurunan atau kenaikan opini WTP dari tahun 2017. Kenaikan opini tersebut terjadi pada pemerintah kabupaten dari 298 LKPD (72%) menjadi 327 LKPD (79%). Begitu pula pada pemerintah kota yang mengalami kenaikan dari 80 LKPD (86%) menjadi 84 LKPD (90%). Sementara itu, terjadi penurunan opini WTP pada pemerintah provinsi dari 33 LKPD (97%) menjadi 32 LKPD (94%). Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini TMP menjadi opini WDP pada 6 LKPD, dan dari opini WDP menjadi WTP pada 46 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi antara lain karena pemerintah daerah telah melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP (<https://www.bpk.go.id>, 2019).

Isma Yatun mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan atas LKPD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Timur, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dengan opini WTP tersebut, Pemprov Jatim telah delapan kali mendapat predikat tersebut. Oleh karena itu, Isma Yatun berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pengelolaan

keuangan yang baik (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/556027/bpk-berharap-jatim-pertahankan-opini-wtp-yang-dicapai>, 2019).

Opini WTP ini diraih Pemprov Jatim karena berhasil memenuhi beberapa kriteria, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, serta pengungkapan yang cukup. Usai menerima LHP dari BPK ini, dalam sambutannya Gubernur Jatim mengungkapkan bahwa diraihnya opini WTP ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen aparatur Pemprov Jatim dalam meningkatkan kinerja, khususnya dalam bidang yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah (<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/kali-kedelapan-pemprov-jatim-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri/>, 2019)

Tabel 1.1
Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018

| No. | Entitas | OPINI AUDIT BPK | | | | |
|-----|------------------|-----------------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Prov. Jawa Timur | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Kab. Bangkalan | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 3 | Kab. Banyuwangi | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 4 | Kab. Blitar | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 5 | Kab. Bojonegoro | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 6 | Kab. Bondowoso | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 7 | Kab. Gresik | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 8 | Kab. Jember | WDP | WTP | WDP | WTP | WDP |
| 9 | Kab. Jombang | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 10 | Kab. Kediri | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 11 | Kab. Lamongan | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 12 | Kab. Lumajang | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 13 | Kab. Madiun | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 14 | Kab. Magetan | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 15 | Kab. Malang | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |

| | | | | | | |
|----|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 16 | Kab. Mojokerto | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 17 | Kab. Nganjuk | WTP DPP | WTP | WDP | WTP | WTP |
| 18 | Kab. Ngawi | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 19 | Kab. Pacitan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 20 | Kab. Pamekasan | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 21 | Kab. Pasuruan | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 22 | Kab. Ponorogo | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 23 | Kab. Probolinggo | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 24 | Kab. Sampang | WDP | WDP | WDP | WDP | WTP |
| 25 | Kab. Sidoarjo | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 26 | Kab. Situbondo | WTP DPP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 27 | Kab. Sumenep | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 28 | Kab. Trenggalek | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 29 | Kab. Tuban | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 30 | Kab. Tulungagung | WTP DPP | WTP | WDP | WTP | WDP |
| 31 | Kota Batu | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 32 | Kota Blitar | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 33 | Kota Kediri | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 34 | Kota Madiun | WTP DPP | WTP | WDP | WTP | WTP |
| 35 | Kota Malang | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 36 | Kota Mojokerto | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 37 | Kota Pasuruan | WDP | WTP | WTP | WTP | WDP |
| 38 | Kota Probolinggo | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP |
| 39 | Kota Surabaya | WTP DPP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Sumber: www.bpk.go.id

Penyusunan laporan keuangan tahun 2014 hanya kabupaten Pacitan yang meraih opini audit WTP, tahun 2015 terdapat 29 kabupaten/kota yang sudah meraih opini WTP dan 9 kabupaten/kota yang masih meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyusunan laporan keuangan tahun 2016 terdapat 30 kabupaten/kota yang meraih opini WTP dan 8 kabupaten/kota meraih WDP. Opini audit untuk laporan keuangan tahun 2017 berupa WTP untuk 37 kabupaten/kota

dan WDP untuk 1 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, terdapat 3 kabupaten/kota yang belum berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu; Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Pasuruan. Sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010, maka sejak tahun 2015 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur harus menerapkan SAP berbasis akrual.

Bapak Purwanto sekretaris BPPKAD Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 6 Juli 2020 menjelaskan:

“Laporan keuangan itu seharusnya diserahkan tiga bulan setelah pelaksanaan anggaran berakhir atau paling lambat 31 Maret. Pada tahun 2015 lalu Kabupaten Ponorogo mengalami keterlambatan dalam penyerahan LKPD kepada BPK pada akhir bulan April, ini disebabkan karena laporan yang kurang lengkap dari masing-masing SKPD. LKPD yang diserahkan diharapkan lengkap dan tidak ada satupun yang kurang perihal laporan keuangan sehingga predikat WTP bisa didapatkan lagi (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, sekretaris BPPKAD Kabupaten Ponorogo pada tanggal 6 Juli 2020).

Dari penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa SKPD Kabupaten Ponorogo pada awal diberlakukannya penerapan SAP basis akrual mengalami keterlambatan dalam penyerahan LKPD kepada BPK. Fenomena tersebut semakin memberikan suatu penguatan bahwa masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual pada tingkat pemerintah daerah hingga saat ini, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut atas kendala-kendala yang berkaitan dengan implementasi SAP berbasis akrual tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas LKPD tahun 2015 atau LKPD pertama berbasis akrual yang disampaikan oleh BPK berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). Berikut ini adalah perkembangan opini LKPD Kabupaten Ponorogo sebelum diterapkannya SAP berbasis akrual dan setelah penerapannya.

Tabel 1.2
Hasil Opini LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2010–2018

| Tahun | Opini |
|--------------|--------------|
| 2010 | WDP |
| 2011 | WDP |
| 2012 | WTP |
| 2013 | WTP DPP |
| 2014 | WTP DPP |
| 2015 | WTP DPP |
| 2016 | WTP |
| 2017 | WTP |
| 2018 | WTP |

Sumber: Data olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan pada tahun 2013-2015 yang mana opini diperoleh dari BPK menurun menjadi WTP-DPP. Tetapi Pemerintah Kabupaten Ponorogo berhasil meningkatkan opini WTP dari BPK-RI setelah diterapkannya SAP berbasis akrual penuh pada tahun 2015. Walaupun dalam pengimplementasiannya pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berhasil memperoleh opini WTP dari BPK namun ternyata sampai saat ini masih ditemukan banyak kendala-kendala dalam pengimplementasian SAP itu sendiri. Penjelasan ini didukung oleh pernyataan Bapak Purwanto sekretaris BPPKAD Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 6 Juli 2020 menyatakan bahwa:

“Kurangnya SDM yang kompeten terutama pada bagian pengelola keuangan belum sepenuhnya memahami SAP berbasis akrual. Jumlah tenaga akuntan pada PPKD ataupun masing-masing SKPD masih sedikit. Sistem akuntansi dan aplikasi yang masih sulit dipahami. Aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya bisa diandalkan. Sebenarnya Ponorogo telah menggunakan SIMDA dalam melakukan penantausahaan belanja daerah, namun untuk penatausahaan pendapatan daerah masih menggunakan sistem manual. Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan serta kurangnya koordinasi baik internal SKPD maupun antar SKPD dengan BPPKAD merupakan salah satu penyebab utama keterlambatan dalam penyusunan LKPD” (Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, sekretaris BPPKAD Kabupaten Ponorogo pada tanggal 6 Juli 2020).

Supaya bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, tentunya penerapan ini membutuhkan berbagai faktor pendukung. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten (Simanjuntak, 2010). SDM merupakan faktor penting dalam adopsi akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dukungan SDM yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual (Halim dan Kusufi, 2014).

Menurut Desiana (2014) pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan mampu menerapkan SAP berbasis akrual, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia wajib dilakukan. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya, melainkan kompetensi dasar yang dimilikinya. Selain itu penerapan basis akrual juga

ditentukan oleh sistem yang digunakan (Herlina, 2013). Penelitian Asri (2015), Putra & Ariyanto (2015), dan Sukadana & Mimba (2015) menyimpulkan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Namun, penelitian Nadir & Hasyim (2017) membuktikan bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Faktor lain yang tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan penerapan akuntansi akrual adalah sistem informasi akuntansi (SIA). Menurut Romney & Steinbart (2009), SIA dikatakan sebagai sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data agar dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. SIA dalam pemerintahan dapat berupa prosedur baik manual maupun terkomputerisasi (*hardware dan software*) yang dapat membantu personel dalam menyusun laporan keuangan. Ketersediaan software dan hardware ini akan membantu SKPD dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian Tuasikal (2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan dalam menunjang pengelolaan keuangan. Berbeda dengan Tawaqal & Suparno (2017) dan Dewi dkk (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan SIA terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

Faktor yang terakhir yaitu komitmen organisasi. Meyer, Allen, & Smith (1997) merumuskan komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk

melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama.

Salah satu penyebab buruknya penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya komitmen organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2017) dan Dewi dkk (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hasil tersebut tidak selaras dengan penelitian Asri (2015) yang justru membuktikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di Pekanbaru. Adanya research gap tersebut mendasari penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan latarbelakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris di SKPD Kabupaten Ponorogo)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang dimiliki oleh pegawai keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang dimiliki oleh pegawai keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang dimiliki oleh pegawai keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang dimiliki oleh pegawai keuangan SKPD Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang dimiliki oleh pegawai SKPD Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang dimiliki oleh pegawai keuangan SKPD Kabupaten Ponorogo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan masukan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi sektor publik khususnya mengenai teori implementasi kebijakan publik dalam hal ini terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
2. Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai pemanfaatan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, serta komitmen organisasi, dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang diaplikasikan pada dunia kerja.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, serta komitmen organisasi yang diterapkan oleh satuan kerja.
2. Memberikan manfaat bagi organisasi khususnya satuan kerja Dinas/Badan/Sekretariat yang ada di wilayah kerja pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mempertimbangkan dampak penggunaan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, serta komitmen organisasi terhadap penerapana standar akuntansi berbasis akrual dan mendorong setiap organisasi untuk memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk membantu meningkatkan penerapan standar akuntansi berbasis akrual.